

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	KOMPAS	13	19-08-2002

Pajak Digenjot, Subsidi Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menggenjot penerimaan pajak hingga mencapai Rp 260,8 triliun pada tahun 2003, agar mampu menutupi 73,7 persen dari anggaran belanja negara. Anggaran penerimaan pajak itu meningkat 15,7 persen dari target pajak APBN 2002 senilai Rp 219,6 triliun. Di sisi lain, pemerintah akan mengurangi anggaran subsidi sebesar 39 persen dari Rp 41,5 triliun dalam APBN 2002 menjadi hanya Rp 25,3 triliun dalam RAPBN 2003.

Demikian tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2003 yang disusun pemerintah. Rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi 13,3 persen dari sebelumnya pada APBN 2002 yang hanya 13,0 persen.

Menteri Keuangan Boediono dalam penjelasannya di Jakarta akhir pekan lalu mengatakan, agar dapat mencapai penerimaan pajak tahun 2003, pemerintah akan menghilangkan segala kebijakan yang memberikan perlakuan khusus terhadap wajib pajak. Dia juga mengutarakan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah khusus untuk pembebanan administrasi perpajakan, seperti ekstensifikasi untuk menambah jumlah wajib pajak dan intensifikasi agar wajib pajak diharapkan memenuhi kewajibannya.

Kebijakan khusus yang akan dikeluarkan pemerintah, antara lain menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan dari revaluasi aset, pengenaan PPh atas *capital gain* dari pengalihan hak penanaman minyak suatu perusahaan minyak kepada perusahaan lain, pencabutan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang strategis. Selain itu, meningkatkan persentase nilai jual kena pajak (NJKP) Pajak Bumi dan Bangunan, perubahan strata industri rokok dari tiga strata menjadi dua strata yakni industri kecil dan nonkecil, serta perubahan tarif cukai dari *ad valorem* menjadi *semi specific*.

Agar rencana penerimaan PPN dan PPhBM dapat dicapai, pemerintah menempuh pengenaan PPN atas jalan tol yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar Rp 0,1 triliun, pencabutan PPN atas barang strategis yang diperkirakan menghasilkan penerimaan PPN sekitar Rp 0,9 triliun. Sementara barang strategis terdiri dari listrik untuk rumah tangga dengan kapasitas dari 2.200 hingga 6.600 watt, dan listrik untuk nonrumah tangga yang menghasilkan sekitar Rp 0,66 triliun, serta makanan ternak yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar Rp 0,24 triliun.

Subsidi BBM

Pemerintah akan memotong subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 55,3 persen, sehingga nilainya tinggal Rp 13,6 triliun dibandingkan tahun 2002 yang mencapai Rp 30,4 triliun. Akibat pengurangan ini, dipastikan harga BBM untuk semua jenis akan mencapai 100 persen harga pasar sesuai harga *Mid Oil Platt Singapore* (MOPS) dan dengan ditambah biaya pengangkutan sebesar lima persen.

Dalam RAPBN 2003, disebutkan faktor pengurangan subsidi BBM yakni turunnya

JENIS PAJAK	2002	2003
Pajak Penghasilan (PPh)		
Migas	15.681,9	12.550,7
Non-migas	88.815,3	112.153,4
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	70.099,8	82.132,9
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.924,2	7.462,7
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.205,0	2.410,7
Cukai	22.352,9	27.645,6
Pajak lainnya	1.949,7	2.172,2
Bea Masuk	12.249,0	13.822,8
Pajak/ Pungutan Ekspor	349,7	434,4
Total	219.627,5	260.785,4

Sumber : RAPBN 2003

harga minyak mentah internasional dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selain itu, karena adanya kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri menjadi 100 persen dari harga pasar, yang semula hanya 75 persen. Kecuali bensin yang sudah mencapai harga 100 persen harga pasar.

Dalam RAPBN 2003, juga dijelaskan bahwa penyesuaian harga BBM tersebut pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan rencana umum (*grand strategy*) penghapusan subsidi BBM pada tahun 2004 sesuai UU Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2002-2004.

Meski demikian, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan tahun 2003 untuk dana kompensasi sosial bagi Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE) sebesar Rp 3,1 triliun, untuk pendidikan, kesehatan, pangan (beras), transportasi, air bersih, pemberdayaan masyarakat pesisir dan kredit mikro.

Meskipun pemerintah berencana mengurangi subsidi terhadap BBM secara signifikan, namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mene-

gaskan bahwa harga minyak tanah untuk rumah tangga tetap disubsidi. Selama ini harganya sudah dipatok Rp 600 per liter, tidak dipengaruhi harga minyak dunia dan kurs dollar AS. Namun, jumlah subsidi minyak tanah masih akan dibicarakan. Patokan harganya kemungkinan bisa berubah juga.

Menyinggung alasan penetapan asumsi harga minyak mentah sebesar 20,5 dollar AS per barrel dalam APBN 2003 yang dinilai rendah, Purnomo mengatakan "Betul, dalam enam bulan terakhir rata-rata harga minyak mentah mencapai di atas 22 dollar AS per barrel. Namun, itu bukan dari sisi fundamental. Jika berdasarkan sisi fundamental, hingga tahun depan harga minyak belum juga membaik," kata Purnomo sembari menunjuk kemelut di Timur Tengah yang memicu dampak psikologis terhadap peningkatan harga minyak.

Jika kelak harga minyak mentah melampaui 20,5 dollar AS per barrel dan target penerimaan dari migas tahun 2002 tercapai seperti tahun 2000 dan 2001, selisih penerimaan itu akan dimasukkan ke pos-pos lain untuk membantu pengamanan APBN.

(HAR/JOE/TIA/BOY)